ANALISIS GENDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TANAH LAUT

Gender Analysis in Community Forest Management in Tanah Laut Forest Management Unit (KPH)

Mayada Putri, Muhammad Helmi, dan Mufidah Asyari
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *This study aims to analyze gender equality and gap factors, analyze gender roles in decision making, and create action plans in policy recommendations based on the Gender Analysis Pathway matrix for gender-responsive Community Forest management in KPH Tanah Laut. Data collection was conducted in 3 KTHs in Tanah Laut Regency, namely KTH Gunung Birah, Panyipatan District, KTH Batu Kura, Bajuin District, and Gapoktan Sumber Kahuripan, Ujung Batu District. Primary data were obtained from the results of semi-structured interviews using questionnaires to KTH members who were 59 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with the Head of each KTH. The results of this study found gender gaps that occurred in the 3 KTHs in 4 gap analysis factors, namely access, participation, control, and benefits. The exclusion of women from management is a problem in the access factor. In addition to minimal representation, women also do not provide significant control so that the implementation of the Community Forest management program is not gender responsive. This proves that the lack of access and participation of women's groups will affect the control and benefits generated from the Community Forest management activities. The average percentage of men in decision making is 33.65%, women 26.1%, and balanced 40.25%.*

Keywords: *Gender Analysis Pathway; Decision making; KTH; KPH*

ABSTRAK. Penelitian in bertujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dan faktor kesenjangan, menganalisis peran gender dalam pengambilan keputusan (*decision making*), dan membuat rencana aksi dalam saran kebijakan berdasar martiks *Gender Analysis Pathway* pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang responsif gender di KPH Tanah Laut. Pengumpulan data dilakukan di 3 KTH di Kabupaten Tanah Laut, yaitu KTH Gunung Birah kec Panyipatan, KTH Batu Kura kec Bajuin, dan Gapoktan Sumber Kahuripan kec Ujung Batu. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan menggunakan kuesioner kepada anggota KTH yang menjadi respoden sebanyak 59 orang. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap Ketua masing-masing KTH. Hasil penelitian ini ditemukan kesenjangan gender yang terjadi di 3 KTH tersebut pada 4 faktor analisis kesenjangan yakni faktor akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Tidak diikutsertakannya perempuan dalam kepengurusan merupakan permasalahan pada faktor akses. Selain keterwakilan yang rendah, perempuan juga tidak memiliki kontrol yang signifikan, yang menyebabkan program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menjadi kurang peka terhadap gender. Ini menunjukkan bahwa rendahnya akses dan partisipasi dari kelompok perempuan akan berdampak pada kontrol dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tersebut. Rata-rata persentase laki-laki dalam pengambilan keputusan adalah 33,65%, perempuan 26,1%, dan seimbang 40,25%.

Kata kunci: *Gender Analysis Pathway*; Decision making; KTH; KPH

Penulis untuk korespondensi, surel: mayadaputri91121@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada saat ini memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dalam era modern seperti saat ini kesempatan terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensinya dalam segala bidang. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensinya dan sama-sama memiliki peran penting dalam pembangunan. Masyarakat, baik pria maupun wanita, dapat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan

Kelompok Tani Hutan dan memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait kegiatan pengelolaan maupun aktivitas lainnya. Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan ini dapat dianalisis dari sudut pandang gender.

Pembangunan di bidang kehutanan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan solusi skema perhutanan sosial berupa hutan kemasyarakatan untuk meningktkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Bentuk bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan seperti adanya Lembaga yang melindungi hak masyarakat sekitar hutan, pelibatan masyarakatan dalam berbagai kegiatan sekitar hutan, izin pengelolaan, adanya hasil hutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan baik untuk sendiri maupun dijual, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Koordinasi dalam suatu kelompok sangat krusial selama proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan memerlukan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan merupakan langkah awal untuk menentukan tindakan yang akan diambil, yang dianggap paling sesuai dengan permasalahan yang ada. Peran dan kesetaraan gender juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan ini. Kesetaraan gender menjadi penting dalam pengambilan keputusan, terutama di era modern yang membawa perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memengaruhi pandangan terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Kebebasan dalam pengambilan keputusan mendorong timbulnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara anggota kelompok. Banyak responden merasakan manfaatnya sebagai upaya untuk menanamkan komitmen tanggung jawab bersama dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki 12 desa yang mendapat izin SK IUPHKm MenLHK dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm) diantaranya kecamatan Panyipatan, Bajuin , dan Tambang Ulang yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) selama 35 tahun. Melalui izin tersebut pemerintah berupaya melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada sekitar hutan tersebut yang dalam pengelolaannya diharapkan dapat melibatkan laki-laki maupun perempuan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan gender yang terjadi dan bagaimana rencana aksi atau kebijakan untuk meminimalkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diambil langsung di lapangan misalnya wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dapat dari sumber litelatur.

Penentuan responden dilakukan dengan ketentuan tertentu atau atas pertimbangan peneliti sendiri (*purposive sampling*). Kriteria yang diambil sebagai sampel responden yaitu anggota dari KTH Gunung Birah, KTH Batu Kura, dan Gapoktan Sumber Kahuripan. Responden tersebut bisa laki-laki atau perempuan yang dianggap menguasai atas data penelitian dan bersedia untuk diwawancara.

Mengingat banyaknya jumlah anggota KTH maka untuk mempermudah kegiatan pengambilan sampel responden penelitian dengan tingkat presisi sebesar 10%, melalui perhitungan rumus slovin. Alasan peneliti menetapkan tingkat presisi sebesar 10% dari jumlah anggota kelompok tani hutan karena dianggap cukup untuk mewakili semua anggota kelompok tani hutan dalam suatu penelitian. rumus Slovin menurut (Sevilla, 2007) adalah :

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N}e^2}$$

Keterangan:
n = Ukuran sampel/jumlah responden
N = Ukuran populasi
e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0,1

Jumlah responden dilakukan proposional pada masing-masing KTH dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ni = \frac{\text{ni}}{\text{N}} \text{ x } n$$

Keterangan:
ni = Jumlah responden per kelompok
Ni = Jumlah anggota per kelompok
N = Jumlah total anggota
n = Jumlah total responden

Tabel 1. Jumlah anggota KTH

KTH	Anggota (orang)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Gunung Birah	49	36	13
Batu Kura	36	32	4
Sumber Kahuripan	57	44	13
Jumlah	142	112	30

Jumlah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Gunung Birah adalah 49 orang, Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Kura berjumlah 36 orang, dan Kelompok Tani Hutan (KTH) berjumlah 57 orang. Berdasarkan jumlah tersebut didapati jumlah responden 59 orang.

Perhitungan Jumlah Responden:

$$n = \frac{142}{1 + (142)(0{,}1)^2}$$

$$n = 59 \text{ Responden}$$

Kelompok Tani Hutan (KTH) Gunung Birah

$$ni = \frac{49}{142} \text{ x } 59$$

$$ni = 20 \text{ Orang}$$

Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Kura :

$$ni = \frac{36}{142} \text{ x } 59$$

$$ni = 15 \text{ Orang}$$

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Sumber Kahuripan :

$$ni = \frac{57}{142} \text{ x } 59$$

$$ni = 24 \text{ Orang}$$

Terdapat sembilan langkah dalam proses *Gender Analysis Pathway* yang dibagi menjadi dua komponen, yaitu (1) tahap analisis dan (2) tahap integrasi gender. Langkah 1 hingga 5 termasuk dalam tahap analisis gender, sementara langkah 6 hingga 9 berada dalam tahap integrasi gender, yang merupakan hasil dari analisis tersebut.

Data primer berupa hasil wawancara bersama informan dikumpulkan lalu dimuat pada tabel antara laki-laki dan perempuan untuk mengetahui peran masing-masing gender dalam pengambilan keputusan sehingga juga akan diketahui apakah ada kesenjangan gender yang terjadi dalam pengelolaan KTH atau tidak.

Terdapat 80 KTH di wilayah KPH Tanah Laut dan pada penelitian ini dibatasi hanya pada KTH Gunung Birah, KTH Batu Kura, dan Gapoktan Sumber Kahuripan yang merupakan 3 KTH terbaik di Kabupaten Tanah Laut yang mendapatkan penghargaan Wanalestari Tingkat Nasional yang mengelola atau melaksanakan program perhutanan 983nalis berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang aktif dan sudah produksi atau menghasilkan sehingga dapat diketahui kontribusi dan peran gender dari program Hutan Kemasyarakatan (HKm) nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden pada penelitian ini berjumlah 59 orang anggota KTH yang terdiri dari 20 orang anggota KTH Gunung Birah, 15 orang anggota KTH Batu Kura, dan 24 orang anggota Gapoktan Sumber Kahuripan.

Masing-masing informan diberikan kode untuk memudahkan penulisan, kode tersebut yaitu **A** untuk Kelompok Tani Hutan (KTH)

Gunung Birah, **B** untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Kura, dan **C** untuk Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Sumber Kahuripan. Kode 1 ditujukan untuk Ketua KTH dan 2 hingga seterusnya untuk anggota. Penulisan kode tersebut digunakan untuk mempermudah dan mempersingkat dalam penulisan.

Ada lima langkah dalam tahap Analisis Gender, mulai dari identifikasi, penyajian data, hingga analisis sumber-sumber kesenjangan yang ada dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut. Lalu terdapat 4 langkah pada tahap integrasi yaitu menreformulasi tujuan, hingga dengan memberikan saran kebijakan untuk KPH Tanah Laut yang responsive gender Lima analisis dalam tahap Analisis Gender meliputi identifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan, penyajian data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpisah menurut jenis kelamin sebagai data pendukung, analisis sumber dan faktor penyebab kesenjangan gender, seperti partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta manfaat dari pengelolaan HKm, dan identifikasi masalah-masalah gender berdasarkan faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut.

Identifikasi tujuan dan sasaran Kelompok Tani Hutan (KPH)

Tujuannya untuk melaksanakan program dari KPH Tanah Laut dan untuk mensejahterakan masyarakata sekitar. Sasarannya adalah masyarakat sekitar dan seluruh anggota KTH, tergantung mereka ingin nya apa, berusaha di bidang/kelompok KUPS mana.

Tujuan dan sasaran pada *Gender Analysis Pathway* seharusnya berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, berdasarkan pernyataan informan, tampak tidak adanya komitmen dari pihak penyelenggara untuk berusaha menyeimbangkan posisi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan HKm. Selanjutnya, Ketua Gapoktan Sumber Kahuripan menambahkan langkah-langkah yang perlu diambil agar kesetaraan gender menjadi salah satu fokus dalam kegiatan HKm.

Sajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin.

KPH Tanah Laut yang dalam penelitian ini diambil 3 KTH (KTH Gunung Birah, KTH Batu Kura, dan Gapoktan Sumber Kahuripan) sebagai sampling memiliki 142 anggota yang terdiri dari 112 Laki-laki (78,8 %) dan 30 perempuan (21,2 %).

Berdasarkan wawancara dengan ketiga ketua KTH, satu dari 3 KTH tidak mempermasalahkan ketimpangan jumlah yang terjadi, yaitu KTH Gunung Birah yang menganggap kegiatan kelompok mereka memang memerlukan banyak tenaga laki-laki (fisik). Namun KTH Batu Kura dan Gapoktan Sumber Kahuripan kurang setuju dengan hal tersebut, sebab banyak perempuan masyarakat sekitar yang ingin bergabung namun dibatasi.

Analisis sumber dan faktor-faktor penyebab kesenjangan gender

Faktor kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan ada 4 yaitu faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

1. Sumber dan faktor penyebab kesenjangan gender (internal)

   Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan oleh peneliti dalam penelitian ini, terdapat faktor-faktor penyebab kesenjangan gender dari sisi internal, di mana kualitas peserta perempuan menjadi sorotan utama karena dianggap pasif dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di KPH Tanah Laut. Perempuan dianggap pasif hanya karena jarang menghadiri rapat, padahal dalam kegiatan mereka sering terlibat.
2. Sumber dan faktor penyebab kesenjangan gender (eksternal)

   Sebelum masuk pada tahap integrasi gender, perlu juga dilakukan analisa mengenai proses pengambilan keputusan berdasarkan gender. Persentase pengambilan keputusan dapat dilihat pada Tabel 2.
3. Peran gender dalam pengambilan kepuutsan ini cukup penting karena dari hal itu dapat dilihat bagaimana peran gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, seperti contohnya apabila keputusan didominasi oleh saran dari salah satu gender maka disinilah terlihat bagaimana salah satu gender tersebut mendominasi.

Tabel 2. Pengambilan Keputusan

No.	Pernyataan	Pengambilan Keputusan							
		Laki-laki		Perempuan		Seimbang		Total	
		N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
1	Pemilihan jenis tanaman	32	54	11	18.64	16	27.12	59	100
2	mengatur pemakaian sarana bertani	23	38.98	13	22.03	23	38.98	59	100
3	mengatur pembelian alat dan bahan	23	38.98	13	22.03	23	38.98	59	100
4	mengatur kegiatan pemeliharaan tanaman	10	16.95	13	22.03	36	61.02	59	100
5	mengatur kegiatan pemupukan tanaman	25	42.37	11	18.64	23	38.98	59	100
6	merencanakan biaya usaha dalam pengelolaan HKm	13	22.03	25	42.37	21	35.59	59	100
7	mengelola uang dalam pengelolaan HKm	14	23.73	21	35.59	24	40.68	59	100
8	meminjam uang/kredit untuk usaha dalam pengelolaan HKm	19	32.2	16	27.12	24	40.68	59	100
	Rata-rata	**33.65**		**26.1**		**40.25**		**100**	

Keterangan:
N = Jumlah Responden
% = Persentase

Sumber/faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut dari segi eksternal dari sisi penyelenggara yakni KPH Tanah Laut, hal ini merupakan faktor akses dan gambaran bagaimana pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Seperti pada paparan sebelumnya, permasalahan akses bagi peserta perempuan pada program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm di Kabupaten Tanah Laut ini memang menjadi salah satu permasalahn utama, karena adanya batasan untuk perempuan tergabung dalam struktural.

Ketua Gapoktan Sumber Kahuripan dalam paparannya menjelaskan bahwa dulu pada saat awal pembentukan KTH banyak sekali perempuan yang ingin bergabung, namun berdasarkan arahan KPH Tanah Laut juga untuk memangkas jumlah perempuan, maka hanya sedikit yang tertulis di SK dan hanya diwakilkan suaminya, namun pada jalannya kegiatan pengelolaan analisa tetap perempuan terlibat.

Rata-rata persentase laki-laki dalam pengambilan keputusan adalah 33,65%, perempuan 26,1%, dan seimbang 40,25%. Pengambilan keputusan dalam keuangan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan lebih dominan diputuskan oleh perempuan, sedangkan dalam keputusan mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah keuangan kelompok dan uang pinjaman untuk usaha dominan diputuskan bersama, karena masalah keuangan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan masalah bersama dan bukan hanya masalah Sebagian gender saja. Dalam mengelola uang keluarga lebih dominan perempuan yang mengelola karena perempuan lebih bisa mengatur dan mengelola uang agar bisa mencukupi kebutuhan dan keperluan KTH sampai pada masa kepengurusannya.

Kegiatan pengelolaan tanaman sendiri yang paling banyak berperan dalam mengambil keputusan dalam kegiatan penentuan jenis tanaman pun lebih banyak diputuskan oleh Laki-laki atau suami dalam rumah tangga dengan persentase 54%, pengambilan keputusan dalam mengatur pemakaian sarana bertani seimbang antara keputusan Laki-laki dan keputusan Bersama dengan persentase 38,98%. Pengambilan keputusan dalam mengatur pembelian alat dan bahan seimbang antara keputusan Laki-laki dan keputusan Bersama dengan persentase

38,98%. Pengambilan keputusan dalam mengatur kegiatan pemeliharaan lebih banyak diputuskan bersama dengan persentase 61,02% karena laki-laki lebih mengerti tentang pengelolaan dalam kegiatan penanaman seperti pemupukan, penyiangan dan pembersihan lahan yang memerlukan perlatan dalam aplikasi penanamannya dibandingkan perempuan dan perempuan dianggap lebih telaten dan teliti dalam pemeliharaan tanaman, sehingga pengambilan keputusan cenderung seimbang antara laki-laki dan perempuan (keputusan bersama).

Berbeda halnya dengan pengambilan keputusan dalam merencanakan biaya usaha dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan lebih banyak diputuskan oleh perempuan dengan persentase 42.37%, karena perempuan dianggap lebih teliti dan terencana pada hal perencanaan keuangan.

Merumuskan Kembali kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pertanyaan dasar kepada informan adalah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang bagaimana untuk dapat menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi mereka warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut sendiri. Dari aksesnya harus diperbaiki oleh KPH Tanah Laut dimana kelompok perempuan tidak hanya dilibatkan pada kegiatan atau event tertentu saja namun juga harus dimasukan dalam Struktural organisasi KTH agar dapat kepastian hukum dan mengikat.

Mengidentifikasi indikator gender dari setiap kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Terdapat 4 indikator gender yang bisa digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, 4 indikator tersebut adalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Jika terpenuhi, keempat indikator tersebut dapat memberikan gambaran pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang resonsif terhadap gender.

Indikator akses meliputi cara seperti apa yang dilakukan oleh KPH Tanah Laut dalam menghadirkan seluruh unsur masyarakat dalam struktural Kelompok Tani Hutan termasuk unsur peserta kelompok kepentingan kedua gender (perempuan dan laki-laki). Jika semua unsur peserta telah terpenuhi, proses pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang responsife gender akan dinilai berdasarkan faktor partisipasi kedua gender.

Menyusun rencana aksi yang didasarkan pada kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Langkah berikutnya adalah merancang rencana aksi yang berfokus pada kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di KPH Tanah Laut yang peka gender, dengan tujuan mengurangi kesenjangan gender.

Masalah mengenai *Gender Analysis Pathway* dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024:

1) Keterlibatan perempuan masih sangat minim, kualitas perempuan yang dianggap sangat pasif karena mereka jarang berhadir pada rapat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di KPH Tanah Laut.
2) Kurangnya pemahaman di kalangan perencana pembangunan mengenai kesetaraan gender, yang berakibat pada lemahnya komitmen mereka dalam merancang program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang responsif gender.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil analisa diatas, ada solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah *Gender Analysis Pathway* dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kelompok Tani Hutan (KPH) Tanah Laut berdasarkan panduan matriks *Gender Analysis Pathway* (GAP), antara lain :

1) Berikan ruang partisipasi bagi kelompok perempuan untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan kelompok mereka sendiri minimal sebesar 30% hingga 50% sesuai dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan yang mewakili aspirasi kelompok perempuan akan membawa unsur partisipatif, responsif, dan keadilan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di KPH Tanah Laut.
2) Sosialisasikan dan tanamkan nilai-nilai serta pengetahuan mengenai pembangunan kepada kelompok perempuan yang masih kurang memahami perencanaan pembangunan seperti pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berkualitas akan mampu menciptakan kontrol, penguasaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan program lain yang

dihasilkan dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan atau kualitatif bagi setiap rencana.

Adapun sasaran kuantitatif dan atau kualitatif antara lain:

1) Keterlibatan perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang proporsional dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
2) Meningkatnya kualitas dan keterampilan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan misalnya dengan mengadakan pelatihan atau pelaksanaan kegiatan bersama secara intensif.

Matriks *Gender Analysis Pathway* sebagai hasil analisis dari penelitian ini terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Gender Analysis Pathway

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Usulan GAP								
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (*Base-line*)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan **Kegiatan :** Usaha wisata Gunung Birah, Produksi Kemiri, dan Karet (latex) **Tujuan :** Melaksanakan program dari KPH Tanah Laut dan menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat	Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan	**Akses :** • Kurang atau tidak termuatnya perempuan dalam SK **Partisipasi :** • Kurangnya komunikasi saat pembentukan KTH dalam keterlibatan perempuan **Kontrol :** • Melibatkan perempuan dalam pengelolaan Hkm dengan jumlah yang sesuai (*fit*) **Manfaat :** • Dapat memaksimalkan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan.	perempuan dianggap pasif dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan karena jarang menghadiri rapat padahal dalam kegiatan sering terlibat.	Sesuai arahan KPH Tanah Laut untuk memangkas jumlah perempuan, maka hanya sedikit yang tertulis di SK dan hanya diwakilkan suaminya,	Terlibatnya perempuan dalam SK Kelompok Tani Hutan	Saling berkomunikasi saat pembentukan KTH agar perempuan yang terlibat dalam kegiatan juga dimasukan dalam SK	• Perempuan tidak terlibat dalam kepengurusan (SK) padahal terlibat dalam kegiatan • Minimnya pemahaman bagi para perencana tentang kesetaraan gender	**Output :** Meningkatnya persentase perempuan dalam kepengurusan KTH **Outcome :** Menigkatkan kesejahteraan anggota KTH

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tidak diikutsertakannya perempuan dalam kepengurusan merupakan permasalahan pada faktor akses. Selain partisipasi yang sedikit, perempuan juga tidak dapat memberikan kontrol yang berarti sehingga jalannya program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menjadi tidak responsif gender. Ini menunjukkan bahwa rendahnya akses dan partisipasi kelompok perempuan akan berdampak pada kontrol dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tersebut.

Rata-rata persentase laki-laki dalam pengambilan keputusan adalah 33,65%, perempuan 26,1%, dan seimbang 40,25%.

Dirasa perlu untuk menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan tentang kesetaraan terhadap kelompok perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan 50% kelompok kepengurusan adalah perempuan.

Saran

Saran penulis agar melibatkan perempuan dalam kepengurusan menjadi sebesar 50% dan perlu adanya diskusi dan kesepakatan antar pihak untuk memenuhi target 50% perempuan tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan merumuskan *Gender Budget Statement* serta dapat membandingkan proses Pengambilan keputusan antar KTH tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alhabsyi, Luthfi A. (2016). *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa. Serang

Anita, R. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. Jurnal Studi Gender. **8**(1): 1-34.

Aryadi M, Fauzi H, Satriadi, Nakama E, Tanaka K, Ohta S, & Morikawa Y. (2017). Pengembangan Hasil HUtan Bukan Kayu Kawasan Hutan Lindung Berbasis Perhutanan Sosial (Pembelajaran dari W-Bridge Project Kalimantan Selatan). Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama *Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center*. Banjarbaru

Asyari M, Helmi M, Mardiah, Agustina T, Anwar M, (2023). Bimbingan Teknis Pengolahan Minyak Kemiri di Kelompok Tani Hutan Batu Kura desa Galam Kecamatan Bajuin. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, **2**(3) : 507-514.

Boyer-Rechlin B. (2010). Women in forestry: A study of Kenya's Green Belt movement and Nepal's community forestry program. *Scandinavian Jurnal of Forest research,* **25**(9): 69-72.

Cahyaningsih, Nurka, Gamal P., Warsito. (2006). Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: Panduan Cara Memproses Perijinan dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi. Dinas Kehutanan dan PSDA. Lampung Barat

Fakih M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi H. (2012). Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial. Karya Putra Darwati, Bandung.

Hafizianoor. (2002). Analisis Keadaan Tanah Pada Tegakan Dukuh di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru

Karmila. (2023). Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Prodi Sosiologi Agama UIN Alauiddin Makassar. Makassar

Kodiran. (2006). Peningkatan Partisipasi Wanita dan Pengembangan Hubungan Industrial yang Berwawasan Gender Di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Katsikopoulos V. Konstantinos. (2011). *Herbert Simon's spell on judgment and decision making*. : 722-732

Mardiah, Hafizianoor, Rianawati F. (2023). Pengelolaan dan Kontribusi Tanaman Kemiri (*Aleurites moluccana*) Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Galam Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scienteae*, **6**(3): 355-364.

Nurmaya, I. (2015). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar

Prasetyo, A. (2023). Karakteristik Petani dan Kontribusi Ekonomi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Petani di KPH Tanah Laut. Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru

Pratama A C, Rijanta R. (2021). Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Purnomo D, Itta D, Kadir S. (2023). Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di KPH Tanah Laut. Magister Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru.

Puspitawati, Herein. (2013). Konsep, teori, dan Analisis Gender. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Bogor

Ramadhani F P, Hubeis S Aida V. (2020). Analisis Gender dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Rumah Tangga Pertanian. IPB University. Bogor

Raudhah, Hafizianor, Asysyifa. (2020). Analisis Gender Dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan di Desa Ambungan dan Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari. *Jurnal Sylva Scienteae*. **4**(5): 831-841.

Risyart Albert, Far Far. (2012). Peran Gender Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agribisnis Kepulauan*. **1**(1): 13-27.

Ruslan R. (2008). Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sajogyo P. (1990). Peranan Wanita dalam Perhutanan Sosial Suatu Studi Integrasi Wanita dalam Pembangunan Menuju Era Tinggal Landas. Pusat Studi Wanita. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Saraswati T. (2013). Pengerasutuman Gender Dalam Kebijakan Pembangunan. hhtp://www. komnasperempuan.or.id.

Setiawati T, Uyun P Q, Nurohmah A, Prasetyo A B. (2021). Pedoman teknis Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Kota Yogyakarta. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) . Yogyakarta

Simatauw M, L. Simanjuntak, dan P.T. Kuswardono. (2001). Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis. Yayasan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL), Kupang.

Sola E. (2018). *Decision Making*: Sebuah Telaah Awal. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauiddin Makassar. Makassar

Stephani C. (2009). Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Studi kasus RPH Tanungkerta BKPH Tampomas KPH Sumedang Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten). [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Suharjito D, Sundawati L, Suyanto, Utami SR. (2003). *Aspek Sosial dan Budaya Agroforestri*. Bogor: *Word Agroforestri Centre* (ICRAF)